
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KECENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI

Studi Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau Indonesia

Eny Wahyuningsih¹, Raja Ade², Nina Nursida²

INFO ARTIKEL

Penulis:

¹ Universitas Panca Budi Medan),² FEB
Universitas Islam Riau,³ Feis Uin Suska
Riau.

rajadefitrasari@gmail.com

Untuk mengutip artikel ini:

Rachmawati, Saputra. Erdes. 2022.
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Kecenderungan Kecurangan
Akuntansi Studi Pada Pemerintah
Kabupaten Dan Kota Di Provinsi
Riau Indonesia Jurnal Ekonomi Kiat
Vol. 32, No. 1 (2022), Hal. 66-72.

Akses online:

<https://journal.uir.ac.id/index.php/kiat>

E-mail:

kiat@jurnal.uir.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh keefektifan pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, asimetri informasi, moralitas individu, dan kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Melalui teknik purposive sampling diperoleh 60 SKPD Kabupaten Kota se-Provinsi Riau dengan 120 responden sebagai sampel penelitian. Berdasarkan analisis multiple regression hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, dan kesesuaian informasi yang berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, sedangkan asimetri informasi, dan moralitas individu tidak berpengaruh signifikan

This study aims to empirically examine the effect of the effectiveness of internal control, accounting information compliance, individual asymmetry, and conformity with morality on accounting fraud. Through purposive sampling technique obtained 60 SKPD City Districts in Riau Province with 120 respondents as research samples. Based on multiple regression analysis, the results showed that only internal control, compliance with accounting rules, and appropriateness of information had a significant effect on accounting fraud, while information asymmetry and individual morality had no significant effect.

Kata Kunci: *Fraud Triangle Theory, Agency Theory, and GONE Theory*

1. Pendahuluan

Media utama dalam penyampaian pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat adalah melalui laporan keuangan. Laporan keuangan haruslah disajikan secara wajar dan tidak mengandung unsur kecurangan atau fraud. Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (KKA) pada sektor pemerintahan ini erat kaitannya dengan tindak korupsi.

Dalam korupsi tindakan yang lazim dilakukan diantaranya adalah memanipulasi pencatatan, penghilangan dokumen, dan mark-up yang merugikan keuangan atau perekonomian Negara (Wilopo, 2006). Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan ada lebih dari Rp 3 triliun total kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus korupsi sepanjang tahun 2016 (www.antikorupsi.org).

Maka isu kecenderungan kecurangan akuntansi ini masih menjadi isu yang mendapat perhatian banyak pihak.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Donald R. Cressey, kecurangan akuntansi dapat terjadi dikarenakan adanya fraud triangle yang terdiri dari tekanan, kesempatan dan sikap/rasionalisasi (Tuanakotta, 2012). Tekanan yang dimaksud adalah tekanan dari pihak manajemen untuk melakukan kecurangan, kesempatan berarti terdapat situasi di dalam suatu instansi untuk melakukan kecurangan, dan sikap/rasionalisasi menunjukkan dimana suatu instansi merasionalisasikan tindakan yang tidak jujur atau berbuat curang.

Pengendalian internal memegang peranan penting dalam organisasi atau instansi untuk meminimalisir terjadinya kecurangan. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Maka pengendalian internal yang tidak berjalan secara efektif akan membuka peluang bagi pimpinan dan pegawai dalam melakukan tindak kecurangan.

Keandalan pelaporan keuangan yang disajikan pemerintah akan tercapai jika disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Dalam standar akuntansi tersebut terdapat aturan-aturan yang harus digunakan dalam pengukuran dan penyajian laporan keuangan. Keharusan penyusunan laporan keuangan yang sesuai standar dimaksudkan agar terhindar dari manipulasi data. Wolk and Tearney (1997) menjelaskan bahwa kegagalan penyusunan laporan keuangan yang disebabkan karena ketidaktaatan pada aturan akuntansi, akan menimbulkan kecurangan suatu organisasi atau entitas tidak dapat dideteksi oleh para auditor.

Agency Theory sering digunakan untuk menjelaskan kecurangan akuntansi. Prinsip utama teori ini menyatakan bahwa organisasi sebagai suatu hubungan kerja sama antara pemegang saham (principal) dan manajer (agent) berdasarkan kontrak yang telah disepakati (Jensen and Meckling, 1976). Salah satu kendala yang akan muncul antara principal dan agent adalah adanya asimetri informasi. Menurut Scott (2000) asimetri informasi menimbulkan adanya moral hazard yaitu kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham, sehingga manajer dapat melakukan tindakan di luar pengetahuan pemegang saham yang melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika atau norma mungkin tidak layak dilakukan.

Kecenderungan kecurangan akuntansi sangat erat kaitannya dengan etika. Bologna (1993) menjelaskan fraud dengan GONE Theory yang terdiri dari 4 faktor yang mendorong seseorang berperilaku menyimpang yaitu: Greed (keserakahan), Opportunity (kesempatan), Need (kebutuhan) and Exposure (pengungkapan). Faktor Greed dan Need berhubungan dengan individu sebagai pelaku kecurangan, yang berarti berkaitan dengan tingkat moralitas individu itu sendiri. Moral yang buruk dari individu diasumsikan dapat mendorong individu bertindak

tidak etis dan berlaku curang. Sehingga individu yang tingkat moralitasnya rendah cenderung melakukan tindakan penghilangan atau penambahan jumlah tertentu sehingga terjadi salah saji dalam laporan keuangan.

Faktor lainnya yang menyebabkan seseorang melakukan tindak kecurangan akuntansi adalah ketidakpuasan terhadap tingkat kompensasi. Kompensasi merupakan balas jasa yang diberikan oleh organisasi kepada karyawan yang dapat bersifat finansial maupun non finansial pada periode yang tetap. Wexley dan Yuki (2003) mengatakan bahwa adanya ketidakpuasan karena kompensasi yang tidak memadai atau pekerjaan yang menjemukan juga dapat mendukung insiden-insiden pencurian oleh para pekerja.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan Wilopo (2006) yang telah meneliti mengenai analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada perusahaan publik dan badan usaha milik negara di Indonesia. Yang berbeda pada penelitian sebelumnya adalah penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau. Objek tersebut dipilih berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada DPRD Provinsi Riau atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun 2015. Dari 12 Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Riau, 4 diantaranya masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). BPK juga masih menemukan adanya permasalahan-permasalahan terkait sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan (<http://e-keuangan.riau.go.id>).

Penelitian ini dilakukan dengan menggali persepsi penanggungjawab penyusun laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Riau untuk mengetahui ada tidaknya kecenderungan kecurangan akuntansi dengan beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah keefektifan pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, asimetri informasi, moralitas individu, dan kesesuaian kompensasi.

LITERATURE REVIEW

Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Kecenderungan mempunyai arti kecondongan hati, kesudian atau keinginan. Kecenderungan Kecurangan Akuntansi atau yang dalam bahasa pengauditan disebut fraud. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia/IAI (2015) fraud adalah Setiap tindakan ilegal yang ditandai dengan penipuan, penyembunyian atau pelanggaran kepercayaan. Tindakan ini tidak tergantung pada aplikasi kekerasan atau ancaman kekerasan fisik, tetapi seperti penipuan yang dilakukan oleh partai dan organisasi untuk memperoleh kekayaan (uang atau jasa), menghindari pembayaran atau menghilangkan layanan, dan mengamankan keuntungan pribadi atau bisnis.

Ikatan Akuntan Indonesia (2015) juga menjelaskan kecurangan akuntansi sebagai: 1) Salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan, 2) Salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva (seringkali disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan) yang

berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (PABU) di Indonesia.

Kecenderungan kecurangan akuntansi yang lazim terjadi di pemerintahan berkaitan dengan pengelolaan anggaran pemerintah. Pengalokasian sumber daya cenderung didahulukan kepada program dan proyek yang mudah untuk di selewengkan dananya untuk kepentingan pribadi. Sedangkan dari sisi personal Weygandt, Kimmel, dan Kieso (2010) menjelaskan fraud atau kecurangan sebagai tindakan tidak jujur seorang karyawan demi kepentingannya sendiri yang berdampak merugikan perusahaan atau organisasi tempat dia bekerja.

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kecenderungan kecurangan akuntansi merupakan keinginan untuk melakukan salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pengguna laporan keuangan. Seperti tindakan manipulasi, pemalsuan catatan akuntansi, penghapusan secara sengaja terhadap informasi yang ada dalam laporan keuangan, dan terdapat salah penerapan secara sengaja terhadap prinsip-prinsip akuntansi.

Jenis-Jenis Fraud

Menurut Albreth (2004) *fraud* diklasifikasikan menjadi lima, yaitu:

Embezzlement Employee atau *Occupational Fraud*, merupakan jenis *fraud* yang dilakukan oleh bawahan kepada atasan. Jenis *fraud* ini dilakukan bawahan dengan melakukan kecurangan pada atasannya secara langsung maupun tidak langsung.

Management Fraud, merupakan jenis *fraud* yang dilakukan oleh manajemen puncak kepada pemegang saham, kreditor dan pihak lain yang mengandalkan laporan keuangan. Jenis *fraud* ini dilakukan manajemen puncak dengan cara menyediakan penyajian yang keliru, biasanya pada informasi keuangan.

Investment Scams, merupakan jenis *fraud* yang dilakukan oleh individu atau perorangan kepada investor. Jenis *fraud* ini dilakukan individu dengan mengelabui atau menipu investor dengan cara menanamkan uangnya dalam investasi yang salah.

Vendor Fraud, merupakan jenis *fraud* yang dilakukan oleh organisasi atau perorangan yang menjual barang atau jasa kepada organisasi atau perusahaan yang menjual barang atau jasa. Jenis *fraud* ini dilakukan organisasi dengan memasang harga terlalu tinggi untuk barang dan jasa atau tidak adanya pengiriman barang meskipun pembayaran telah dilakukan.

Customer Fraud, merupakan jenis *fraud* yang dilakukan oleh pelanggan kepada organisasi atau perusahaan yang menjual barang atau jasa. Jenis *fraud* ini dilakukan pelanggan dengan cara membohongi penjual dengan memberikan kepada pelanggan yang tidak seharusnya atau menuduh penjual memberikan lebih sedikit dari yang seharusnya.

Fraud Triangle Theory

Kecurangan (*Fraud*) merupakan suatu tindakan yang umumnya dilakukan secara sengaja oleh seseorang dengan

tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Ada beberapa teori mengenai kecurangan salah satunya adalah *Fraud Triangle*. *Fraud Triangle* merupakan sebuah teori yang dikemukakan oleh Donald R. Cressey, yaitu segitiga kecurangan yang menggambarkan tiga kondisi penyebab terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan (Tuanakotta, 2012). Ketiga faktor tersebut digambarkan dalam *fraud triangle* sebagai berikut:

1. Tekanan (*Pressure*)

Tekanan adalah dorongan orang untuk melakukan kecurangan. Tekanan yang paling sering menjadi penyebab terjadinya kecurangan ialah tekanan akan tuntutan atau kebutuhan ekonomi. Kebutuhan ekonomi yang mendesak inilah yang sering menyebabkan seseorang bertindak curang demi memenuhi kebutuhannya. Tuanakotta (2012) mengungkapkan bahwa status sosial dapat menjadi suatu tekanan bagi seseorang untuk melakukan *fraud*.

2. Peluang (*Opportunity*)

Peluang adalah situasi yang membuka kesempatan bagi manajemen atau pegawai untuk melakukan kecurangan. Diantara ketiga faktor penyebab kecurangan *fraud triangle theory* (*pressure, opportunity, rationalization*), peluang merupakan faktor yang paling mendasari terjadinya kecurangan, peluang ini dapat muncul kapan saja, sehingga pengawasan dan *control internal* perusahaan sangat diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya peluang seseorang melakukan kecurangan.

3. Rasionalisasi (*rationalization*)

Rasionalisasi menjadi elemen penting dalam terjadinya kecurangan, dimana pelaku mencari pembenaran atas perbuatannya. Rasionalisasi merupakan bagian *fraud triangle* yang paling sulit untuk diukur. Menurut Tunggal (2012) rasionalisasi merupakan sikap karakter atau serangkaian nilai-nilai etis yang membolehkan manajemen atau pegawai melakukan tindakan tidak jujur, atau mereka berada dalam lingkungan yang cukup menekan yang membuat mereka merasionalisasikan tindakan yang tidak jujur. Pelaku *fraud* ini pada umumnya menganggap bahwa tindakan yang dia lakukan merupakan tindakan yang benar dan memang haknya, sehingga apa yang dia lakukan bukanlah suatu tindak kecurangan. Anggapan-anggapan yang menjadi alasan inilah yang kerap kali sulit untuk diidentifikasi

Agency Theory

Jensen dan Meckling (1976) adalah orang pertama yang memasukkan unsur manusia dalam model terpadu tentang perilaku perusahaan. Teori ini muncul ketika satu atau lebih individu (*principal*) memerintah individu lain (*agent*) untuk bertindak atas namanya, mendelegasikan kekuasaan kepada agen untuk membuat keputusan demi hasil terbaik bagi prinsipalnya. Namun, pemisahan ini akan menimbulkan perbedaan tujuan atau konflik kepentingan dari keduanya. Misalnya, keputusan yang diambil agen cenderung untuk melindungi dan memenuhi kepentingan mereka terlebih dahulu daripada memenuhi kepentingan *principal*.

Menurut Mardiasmo (2004) Kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) adalah memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Berkaitan dengan masalah keagenan, praktek pelaporan keuangan dalam organisasi sektor publik merupakan suatu konsep yang didasari oleh teori keagenan. Dalam pelaporan keuangan, pemerintah yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.

GONE Theory

Teori GONE dikemukakan oleh Bologna (1993) yaitu terdapat empat faktor pendorong seseorang untuk melakukan kecurangan, antara lain *Greed* (keserakahan), *Opportunity* (kesempatan), *Need* (kebutuhan), *Exposure* (pengungkapan). Faktor *Greed* dan *Need* adalah faktor yang berhubungan dengan individu pelaku kecurangan (faktor *individual*). Sedangkan faktor *opportunity* dan *Exposure* merupakan faktor yang berhubungan dengan organisasi sebagai korban perbuatan kecurangan (faktor *generic*).

Faktor individu berhubungan dengan *greed* tergambar dari moralitas individu itu sendiri, sedangkan motivasi seseorang dalam melakukan suatu tindakan kecurangan berhubungan dengan *need*, adanya kebutuhan yang mendesak menyebabkan orang yang jujur mempunyai motif untuk melakukan kecurangan.

Keefektifan Pengendalian Internal

Pengendalian internal merupakan rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga aset, memberikan informasi yang akurat dan andal, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan (Tunggal, 2011). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) pengendalian internal merupakan suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan Pengendalian Internal Menurut Hall (2011) adalah untuk *safeguard assets of the firm, ensure accuracy and reliability of accounting records and information, promote efficiency of the firm's operations, and measure compliance with management's prescribed policies and procedures*. Sedangkan menurut Mulyadi (2002) tujuan pengendalian internal adalah untuk menjaga kekayaan

perusahaan, dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi.

Pengendalian internal meliputi lima kategori yang dirancang dan diimplementasikan oleh manajemen untuk memberikan jaminan bahwa sasaran hasil pengendalian manajemen akan terpenuhi. Komponen tersebut menurut COSO (*The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission's*) adalah:

1. *Control Environment. The control environment sets the tone of an organization, influencing the control consciousness of its people. It is the foundation for all other components of internal control, providing discipline and structure. Control environment factors include the integrity, ethical values and competence of the entity's people; management's philosophy and operating style; the way management assigns authority and responsibility, and organizes and develops its people; and the attention and direction provided by the board of directors.*
2. *Risk Assessment. Every entity faces a variety of risks from external and internal sources that must be assessed. A precondition to risk assessment is establishment of objectives, linked at different levels and internally consistent. Risk assessment is the identification and analysis of relevant risks to achievement of the objectives, forming a basis for determining how the risks should be managed.*
3. *Control Activities. Control activities are the policies and procedures that help ensure management directives are carried out. They help ensure that necessary actions are taken to address risks to achievement of the entity's objectives. Control activities occur throughout the organization, at all levels and in all functions. They include a range of activities as diverse as approvals, authorizations, verifications, reconciliations, reviews of operating performance, security of assets and segregation of duties.*
4. *Information and Communication. Pertinent information must be identified, captured and communicated in a form and timeframe that enable people to carry out their responsibilities. Information systems produce reports, containing operational, financial and compliance-related information, that make it possible to run and control the business. Effective communication also must occur in a broader sense, flowing down, across and up the organization. All personnel must receive a clear message from top management that control responsibilities must be taken seriously.*
5. *Monitoring. Internal control systems need to be monitored--a process that assesses the quality of the system's performance over time. This is accomplished through ongoing monitoring activities, separate evaluations or a combination of the two. Ongoing monitoring occurs in the course of operations. It includes regular management and supervisory activities, and other actions personnel take in performing their duties.*

Ketaatan Aturan Akuntansi

Aturan akuntansi dibuat sedemikian rupa sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam standar akuntansi terdapat aturan-aturan yang harus digunakan sebagai dasar pengukuran dan penyajian laporan keuangan yang berpedoman terhadap aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

Standar akuntansi yang digunakan oleh pemerintah disebut sebagai standar akuntansi pemerintahan (SAP). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintahan No. 71 tahun 2010. Terdapat delapan prinsip akuntansi yang tertuang dalam Lampiran II Penjelasan PP No. 71 tahun 2010 yang digunakan dalam penyusunan standar akuntansi dalam keuangan pemerintah, yaitu prinsip basis akuntansi, prinsip nilai historis, prinsip realisasi, prinsip substansi mengungguli bentuk formal, prinsip periodisitas, prinsip konsistensi, prinsip pengungkapan lengkap, dan prinsip penyajian wajar.

Menurut Thoyibatun (2009) ketaatan aturan akuntansi dipandang sebagai tingkat kesesuaian prosedur pengelolaan aset organisasi, pelaksanaan prosedur akuntansi, dan penyajian laporan keuangan beserta semua bukti pendukungnya, dengan aturan yang ditentukan oleh BPK dan/atau SAP PP RI Nomor 24 tahun 2005.

Asimetri Informasi

Asimetri informasi adalah kondisi ketidakselarasan saluran informasi antara pihak yang memiliki informasi atau menyediakan informasi dengan pihak yang membutuhkan informasi untuk pengambilan keputusan (Wilopo, 2006). Asimetri informasi merupakan keadaan dimana terjadi ketidakseimbangan informasi yang diperoleh pihak principal dan agent. Kondisi tersebut dapat membuka peluang bagi pegawai untuk menyajikan informasi keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Tujuannya semata-mata karena ingin mendapatkan penilaian yang baik atas kinerjanya dengan melakukan berbagai cara yang kecenderungannya mereka berbuat curang.

Menurut Scott (2000), terdapat dua macam asimetri informasi, yaitu:

Adverse selection, yaitu bahwa para manajer serta orang-orang dalam lainnya biasanya mengetahui lebih banyak informasi tentang keadaan dan prospek perusahaan dibandingkan investor pihak luar. Dan fakta yang mungkin dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pemegang saham tersebut tidak disampaikan informasinya kepada pemegang saham.

Moral hazard, yaitu bahwa kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer tidak seluruhnya diketahui oleh

pemegang saham maupun pemberi pinjaman. Sehingga manajer dapat melakukan tindakan diluar pengetahuan pemegang saham dengan melanggar kontrak yang sebenarnya secara etika atau norma mungkin tidak layak dilakukan.

Moralitas Individu

Arti kata moral adalah nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk.

Menurut Amrizal (2004) dalam suatu organisasi perbuatan curang dapat terjadi karena kurangnya kepedulian positif karyawan/aparat terhadap perbuatan salah tersebut, bahkan dipandang sudah hal yang biasa. Rendahnya kepedulian dan rendahnya moral menyulurkan tindakan kecurangan yang pada akhirnya dapat merusak bahkan menghancurkan organisasi. Peranan moral atau kepribadian yang baik dari seorang pimpinan dan komitmennya yang kuat sangat mendorong tegaknya suatu etika perilaku dalam suatu organisasi dan dapat dijadikan dasar bertindak dan suri tauladan bagi seluruh pegawai.

Selain itu, menurut *fraud triangle theory*, terdapat 3 faktor yang mendorong terjadinya *fraud*, yaitu *opportunity*, *pressure*, dan *rationalisation*. Salah satu faktornya adalah *pressure* yang terkait dengan motivasi akan kebutuhan/tekanan keuangan. *Financial pressures* yang umum terjadi seperti memiliki utang yang banyak, pendapatan yang rendah, dan kebutuhan finansial yang tidak terduga, kemungkinan melahirkan moral yang tidak baik sehingga terjadi tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan moralitas.

Kesesuaian Komensasi

Kompensasi merupakan balas jasa yang diberikan oleh organisasi kepada karyawan, yang dapat bersifat finansial maupun non finansial pada periode yang tetap. Menurut Nawawi (2001) Kompensasi adalah Penghargaan atau ganjaran kepada para pekerja yang telah memberikan kontribusi dalam mewujudkan tujuannya melalui kegiatan yang disebut bekerja.

Sistem kompensasi berpotensi sebagai salah satu sarana terpenting dalam membentuk dan mempengaruhi motivasi kerja. Hal ini dipertegas dengan pernyataan Handoko (2001) bahwa faktor pendorong penting yang menyebabkan manusia bekerja adalah adanya kebutuhan dalam diri manusia yang harus dipenuhi. Dengan kata lain, karyawan bekerja untuk perusahaan dengan harapan mendapatkan kompensasi yang sesuai, sehingga kompensasi adalah suatu imbalan berupa uang maupun barang yang dikeluarkan oleh perusahaan sebagai balas jasa yang telah dilakukan karyawan untuk perusahaan.

Wexley dan Yuki (2003) mengatakan bahwa adanya ketidakpuasan karena kompensasi yang tidak memadai atau pekerjaan yang menjemukan juga dapat mendukung insiden-insiden pencurian oleh para pekerja. Oleh sebab itu, pentingnya kesesuaian kompensasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Menurut Rivai (2010) manajemen kompensasi ada untuk membantu perusahaan mencapai tujuan keberhasilan strategi perusahaan dan menjamin terciptanya keadilan internal dan eksternal.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Kecenderungan kecurangan akuntansi dipengaruhi oleh ada atau tidaknya peluang untuk melakukan hal tersebut (Glifandi, 2011). Maka dari itu perlunya adanya pengendalian internal yang baik agar tidak terjadinya kecurangan-kecurangan tersebut.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Maka pengendalian internal yang tidak berjalan secara efektif akan membuka peluang bagi pimpinan atau pegawai dalam melakukan tindak kecurangan, karena mereka akan memanfaatkan ketidakefektifan pengendalian internal itu sebagai suatu titik lemah perusahaan atau instansi dan melancarkan aksinya dalam melakukan kecurangan (*fraud*).

H1: Keefektifan pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi

Pengaruh Ketaatan Aturan Akuntansi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Ketaatan pada aturan akuntansi di sebuah perusahaan atau instansi dapat mencegah terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi, yang nantinya akan membantu perusahaan untuk menyediakan informasi laporan keuangan perusahaan secara objektif kepada pihak yang berkepentingan.

Apabila dalam penyusunan laporan keuangan di pemerintah daerah tidak menaati aturan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), maka hasil laporan keuangan tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya sehingga menyebabkan kecenderungan kecurangan akuntansi pada laporan keuangan. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan Adelin (2013) yang menyatakan bahwa semakin perusahaan taat pada aturan akuntansi, semakin rendahnya kecenderungan kecurangan akuntansi pada suatu perusahaan.

H2: Ketaatan aturan akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi

Pengaruh Asimetri Informasi Terhadap Kecenderungan Akuntansi

Salah satu kendala yang akan muncul antara principal dan agent adalah adanya asimetri informasi. Asimetri informasi merupakan perbedaan informasi yang didapatkan biasanya antara agent dan principal. Asimetri informasi ini timbul karena jika kedua kelompok (agent dan principal) tersebut adalah orang-orang yang berupaya memaksimalkan utilitasnya (Jensen dan Meckling, 1976) dalam Wilopo (2006). Pada sektor publik, pemerintah daerah (eksekutif) dan DPRD (legislatif) berupaya untuk memaksimalkan utilitasnya masing-masing. Jika terjadi asimetri informasi, yakni posisi legislatif memiliki informasi yang lebih besar, maka akan menyebabkan keinginan yang besar sesuai dengan kebutuhannya terhadap eksekutif dan sebaliknya. Sehingga akan terjadi

kecenderungan kecurangan akuntansi dengan pengalokasian sumber daya akan lebih banyak untuk proyek-proyek yang mudah terjadi kecurangan dan memberikan keuntungan bagi pihak yang bersangkutan.

Adanya perbedaan informasi yang diterima oleh agent dan principal memberikan pengaruh untuk melakukan tindakan kecurangan. Semakin tinggi asimetri informasi maka semakin tinggi tingkat kecenderungan kecurangannya. Dalam penelitian Wilopo (2006) menyebutkan bahwa semakin tinggi asimetri informasi pada perusahaan terbuka dan BUMN di Indonesia, maka semakin tinggi kecenderungan kecurangan akuntansi perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan asimetri informasi dapat berpengaruh terhadap tingkat kecenderungan kecurangan akuntansi.

H3: Asimetri Informasi berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi

Pengaruh Moralitas Individu Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Menurut Simanjuntak (2008), faktor pendorong seorang melakukan kecurangan yang disebabkan oleh moral yaitu *greed* (keserakahan). Keserakahan merupakan bentuk moral seseorang yang jelek. Semua orang berpotensi untuk berperilaku serakah karena pada umumnya manusia itu mempunyai sifat yang tidak pernah merasa puas. Sifat keserakahan yang timbul dari moral yang tidak baik cenderung memicu terjadinya tindakan kecurangan. Sebagian orang memiliki kecenderungan untuk memilih jalan yang tidak jujur. Moralitas merupakan salah satu faktor yang penting dalam timbulnya kecurangan. Adanya tingkah laku atau moral yang jelek atau tidak baik yang mengakibatkan seseorang atau aparat pemerintahan dapat melakukan tindakan kecurangan.

Aparat pemerintahan dengan moralitas yang tinggi diharapkan tidak melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dan melakukan kecurangan akuntansi demi memaksimalkan keuntungan pribadi. Hasil penelitian Aranta (2013) menyimpulkan bahwa moralitas aparat berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Dengan demikian, semakin baik nilai moralitas yang dimiliki aparat pemerintahan maka akan kecil kecenderungan kecurangan akuntansi yang dilakukan.

H4: Moralitas Individu berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi

Pengaruh Kesesuaian Kompensasi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Kompensasi yang sesuai menjadi bagian yang sangat penting bagi kinerja karyawan serta keberhasilan organisasi (Luthans, 1998). Tindakan kecurangan terjadi karena adanya sifat individual yang ingin memaksimalkan keuntungan, dan tingginya kebutuhan pribadi sehingga merasa imbalan yang didapatkan dalam bekerja tidak sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Maka dari itu, dengan adanya kesesuaian kompensasi, kebutuhan individu dapat terpenuhi sehingga tindakan-tindakan kecurangan tersebut dapat dihindari.

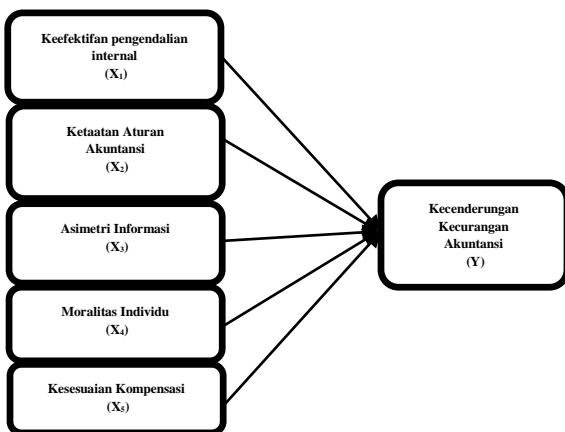
Hasil penelitian Friskila (2010) menyimpulkan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Pemberian kompensasi sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai diharapkan membuat pegawai merasa tercukupi sehingga akan meningkatkan kinerja pegawai dan mengurangi tindakan *fraud*. Apabila seorang pegawai merasa kompensasi yang diterima tidak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya maka akan mendorong pegawai untuk melakukan *fraud*.

H5:Kesesuaian kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Model Penelitian

Gambar 1
Model Penelitian



Metodologi

Penelitian ini menggunakan data primer yang di peroleh dari jawaban kuesioner oleh responden. Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Kota Provinsi Riau, Indonesia yang berjumlah 540 SKPD, terdiri dari Badan, Dinas, Kantor dan Kecamatan. Teknik pemilihan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling. Kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini, 1) SKPD Kabupaten Kota Provinsi Riau berupa instansi Dinas, 2) Dinas yang ada di setiap SKPD Kabupaten Kota yang memiliki keseragaman tugas secara keseluruhan. Dari kriteria tersebut dihasilkan 60 SKPD yang menjadi sampel dengan 2 responden dari setiap SKPD. Adapun Daftar sampel dapat dilihat pada tabel 1:

Tabel 1
Daftar Sampel Penelitian

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	RESPONDEN
14	Dinas Kesehatan	2
15	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	2
20	Dinas Pendidikan	2
29	Dinas Pendapatan Daerah	2
30	Dinas Pekerjaan Umum	2
Jumlah		10
Total Responden: 12 Kabupaten Kota x 10		120

Responden penelitian ini adalah kepala SKPD dan kepala sub bagian keuangan pada SKPD Kabupaten Kota Provinsi Riau. Dengan demikian, dalam penelitian ini kuesioner yang akan disebarakan sebanyak 120 kuesioner

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Dependent Variable (Y)

Kecenderungan kecurangan akuntansi adalah Setiap tindakan ilegal yang ditandai dengan penipuan, menyembunyian atau pelanggaran kepercayaan. Kecenderungan kecurangan akuntansi berfokus pada bagian pengelolaan keuangan di SKPD.

Indikator yang digunakan dalam kecenderungan kecurangan akuntansi yaitu, 1) Kecenderungan untuk melakukan manipulasi, pemalsuan, atau perubahan catatan akuntansi, 2) Kecenderungan untuk melakukan penyajian yang salah atau penghilangan peristiwa transaksi atau informasi yang signifikan dari laporan keuangan, 3) Kecenderungan untuk melakukan salah menerapkan prinsip akuntansi secara sengaja, 4) Kecenderungan untuk melakukan penyajian laporan keuangan yang salah akibat pencurian terhadap aktiva yang membuat entitas membayar barang/jasa yang tidak diterima, 5) Kecenderungan untuk menyajikan laporan keuangan yang salah akibat pelakuan yang tidak semestinya pada aktiva disertai dokumen palsu. Instrumen yang digunakan untuk mengukur kecenderungan kecurangan akuntansi terdiri dari 14 item pertanyaan dikembangkan oleh Aranta (2013) dengan menggunakan 5 skala likert.

Independent Variable (X)

Keefektifan Pengendalian Internal (X1)

Tunggal (2011) mendefinisikan pengendalian internal merupakan rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga aset, memberikan informasi yang akurat dan andal, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Indikator yang digunakan dalam keefektifan pengendalian internal yaitu, 1)Lingkungan pengendalian, 2)Penelitian risiko, 3)Kegiatan pengendalian, 4)Informasi dan komunikasi, 5)Pemantauan. Instrumen yang digunakan untuk mengukur keefektifan pengendalian internal terdiri dari 9 item pertanyaan yang dikembangkan oleh Shintadevi (2015). Jawaban responden diukur dengan skala Likert 1 – 5, semakin tinggi nilai yang ditunjukkan maka pengendalian internal semakin efektif

Ketaatan Aturan Akuntansi (X2)

Aturan akuntansi di buat sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Informasi yang terdapat pada laporan keuangan sangat dibutuhkan oleh stakeholder sebagai dasar pengambilan keputusan, sehingga laporan keuangan harus berpedoman pada aturan-aturan yang dikeluarkan oleh IAI dan sesuai dengan prosedur dan prinsip akuntansi agar dapat diandalkan. Indikator yang digunakan dalam ketaatan aturan akuntansi adalah tanggung jawab penerapan, kepentingan publik, integritas, obyektivitas, kehati-hatian, kerahasiaan, konsistensi dan standar teknis. Variabel ketaatan aturan akuntansi dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan instrument yang dikembangkan oleh Wilopo (2006) dengan 7 item pertanyaan menggunakan 5 skala likert.

Asimetri Informasi (X3)

Asimetri informasi adalah situasi dimana terjadi ketidak selarasan informasi antara pihak yang memiliki atau menyediakan informasi dengan pihak yang membutuhkan informasi. Indikator yang digunakan dalam asimetri informasi yaitu, 1)Manajemen informasi yang lebih baik

atas aktivitas, 2)Manajemen lebih mengenal hubungan input-output, 3)Manajemen lebih mengenal dan mengetahui potensi kerja, 4)Manajemen lebih mengenal teknis pekerjaan, 5)Manajemen lebih mengenal faktor eksternal, 6)Manajemen lebih mengenal apa yang dapat dicapai dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya dibanding pihak luar. Pengukuran variabel ini menggunakan 5 skala Likert, Sangat setuju diberi skor 5, setuju diberi skor 4, ragu-ragu diberi skor 3, tidak setuju diberi skor 2, dan sangat tidak setuju diberi skor 1.

Moralitas Individu (X4)

Moralitas adalah tindakan aparat untuk melakukan hal yang benar dan hal tersebut tidak berkaitan dengan keuntungan atau nilai etika. Moralitas diukur melalui 6 instrumen yang mengukur setiap tahapan moralitas aparat melalui kasus dilema etika akuntansi. Hasil pengukuran atas dilema etika akuntansi ini merupakan cerminan moralitas. Pengukuran variabel ini menggunakan 5 skala Likert, sangat setuju diberi skor 5, setuju diberi skor 4, ragu-ragu diberi skor 3, tidak setuju diberi skor 2, dan sangat tidak setuju diberi skor 1

Kesesuaian Kompensasi (X5)

Menurut Nawawi (2001) Kompensasi adalah Penghargaan atau ganjaran kepada para pekerja yang telah memberikan kontribusi dalam mewujudkan tujuannya melalui kegiatan yang disebut bekerja. Indikator yang digunakan dalam kesesuaian kompensasi adalah gaji, intensif lembur, imbalan tunai setiap kepanitiaan, fasilitas, promosi dan naik golongan. Kesesuaian kompensasi diukur dengan instrumen yang dikembangkan dari komponen-komponen pertimbangan kompensasi yang kemudian dimodifikasi terdiri dari 6 item pertanyaan oleh Arif Tiro (2014). Jawaban responden diukur dengan skala Likert 1 – 5, semakin tinggi nilai yang ditunjukkan maka semakin sesuai kompensasi yang diperoleh.

Uji Kauliatas Data

Uji kualitas data dilakukan dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas dilakukan untuk menilai sejauh mana suatu alat ukur diyakini dapat digunakan untuk mengukur item pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner. Uji Reliabilitas dilakukan untuk melihat reliabilitas masing-masing instrument yang digunakan.

Metode Analisis Data

Untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen menggunakan alat analisa statistik regresi linear berganda (*multiple regression analysis*). Analisis ini dilakukan dengan menggunakan bantuan *Software Eviews*. Persamaan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

Dalam model analisis regresi, terdapat beberapa asumsi-asumsi dasar yang harus dipenuhi terlebih sebelum hipotesis diuji. Asumsi tersebut antara lain uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi. Pengujian hipotesis dalam

penelitian ini di uji dengan tingkat signifikan (*P-Value*) 0.05 atau 5%.

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai (R^2) yang mendekati 1 berarti kemampuan variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Penelitian

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner kepada responden yaitu Kepala SKPD dan Kepala Sub Bagian Keuangan/Akuntansi sebanyak 120 orang ke SKPD Kabupaten Kota se-Provinsi Riau, dihasilkan semua kuesioner kembali dan dapat digunakan dalam tahap analisis. Dari hasil uji kualitas data yaitu uji validitas dan uji reliabilitas menunjukkan bahwa masing-masing item pertanyaan dari variabel keefektifan pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, asimetri informasi, moralitas individu, kesesuaian kompensasi, dan kecenderungan kecurangan akuntansi adalah valid dan pengukuran dapat memberikan hasil yang konsisten bila dilakukan pengukuran kembali dengan gejala yang sama. Sehingga layak digunakan untuk menjadi tolak ukur instrument kuesioner dalam penelitian ini.

Uji Asumsi Klasik

Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data-data dalam peneltian ini memenuhi asumsi normalitas. Hasil uji multikolonieritas menunjukkan variabel bebas dalam model regresi tidak saling berkolerasi. Dilihat nilai *tolerance* dari masing-masing variabel lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF diperoleh lebih kecil dari 10. Hal ini menunjukkan tidak adanya kolerasi antar variabel bebas dalam model regresi sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolonearitas dalam regresi ini. Berikut disajikan hasil uji multikolinearitas pada tabel 2 berikut:

Tabel 2
Hasil Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors			
Date: 04/17/17 Time: 15:25			
Sample: 1 120			
Included observations: 120			
	Coefficient	Uncentered	Centered
Variable	Variance	VIF	VIF
C	51.76724	314.9177	NA

X1	0.023692	187.1292	1.034656
X2	0.027062	120.6698	1.024537
X3	0.003456	9.069293	1.047040
X4	0.014850	26.40256	1.032820
X5	0.019133	53.71300	1.031918

Hasil uji Heteroskedastisitas menunjukkan nilai probabilitas *chi-square obs*R-square* di atas 0.05 dengan tidak menggunakan *cross terms*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Berikut disajikan hasil uji heteroskedastisitas pada tabel 3 berikut:

Tabel 3
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White			
F-statistic	0.535613	Prob. F(5,114)	0.7489
Obs*R-squared	2.754311	Prob. Chi-Square(5)	0.7378
Scaled explained SS	3.316036	Prob. Chi-Square(5)	0.6514

Hasil uji autokorelasi menunjukkan nilai statistik Durbin-Waston adalah sebesar 1.671087. Hal ini membuktikan bahwa nilai DW berada di posisi ragu-ragu yaitu diantara 1.650 sampai 1.880. Maka model penelitian ini sudah terbebas dari kemungkinan adanya autokorelasi. Tidak adanya kolerasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel pengganggu periode sebelumnya

Hasil Analisis Regresi dan Uji Hipotesis

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, data-data dalam penelitian ini diolah dengan uji statistik *multiple regression analysis*. Hasil dari perhitungan analisis regresi disajikan pada tabel 4 berikut:

Tabel 4
Hasil Analisis Regresi

Dependent Variable: Y				
Method: Least Squares				
Date: 04/17/17 Time: 15:16				
Sample: 1 120				
Included observations: 120				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	57.81793	7.194945	8.035909	0.0000
X1	-0.540291	0.153921	-3.510178	0.0006
X2	-0.581205	0.164507	-3.533017	0.0006
X3	0.014984	0.058790	0.254875	0.7993
X4	-0.049237	0.121859	-0.404046	0.6869
X5	0.372375	0.138321	2.692114	0.0082
R-squared	0.233321	Mean dependent var	30.12500	
Adjusted R-squared	0.199695	S.D. dependent var	4.964686	
S.E. of regression	4.441397	Akaike info criterion	5.868522	
Sum squared resid	2248.765	Schwarz criterion	6.007896	

Log likelihood	-346.1113	Hannan-Quinn criter.	5.925122
F-statistic	6.938661	Durbin-Watson stat	1.671087
Prob(F-statistic)	0.000011		

Berdasarkan tabel 4 dapat di lihat hasil dari 120 data observasi yang di analisis yaitu pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Nilai koefisien regresi variabel Keefektifan Pengendalian Internal (X_1) bernilai -0.540291 dengan tingkat signifikan (Probabilitas) 0.0006. Dapat diartikan bahwa setiap peningkatan Keefektifan Pengendalian Internal sebesar 1 maka Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Y) menurun sebesar -0.540291 dengan asumsi variabel lainnya konstan. Hipotesis pertama dalam penelitian ini di terima.
2. Nilai koefisien regresi variabel Ketaatan Aturan Akuntansi (X_2) bernilai -0.581205 dengan tingkat signifikansi (Probabilitas) 0.0006. Dapat diartikan bahwa setiap peningkatan Ketaatan Aturan Akuntansi sebesar 1 maka Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Y) menurun sebesar -0.581205 dengan asumsi variabel lainnya konstan. Hipotesis pertama dalam penelitian ini di terima.
3. Nilai koefisien regresi variabel Asimetri Informasi (X_3) bernilai 0.014984 dapat diartikan bahwa setiap peningkatan Asimetri Informasi sebesar 1 maka Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Y) meningkat sebesar 0.014984 dengan asumsi variabel lainnya konstan. Namun, hipotesis ketiga ini tidak berpengaruh signifikan, dapat dilihat dari tingkat signifikansi (Probabilitas) besar dari 0.05 yaitu 0.7993.
4. Nilai koefisien regresi variabel Moralitas Individu (X_4) bernilai -0.049237 dapat diartikan bahwa setiap peningkatan Moralitas Individu sebesar 1 maka Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Y) menurun sebesar -0.014984 dengan asumsi variabel lainnya konstan. Namun, hipotesis ketiga ini tidak berpengaruh signifikan, dapat dilihat dari tingkat signifikansi (Probabilitas) besar dari 0.05 yaitu 0.6869.
5. Nilai koefisien regresi variabel Kesesuaian Kompensasi (X_5) bernilai 0.372375 dengan tingkat signifikansi (probabilitas) 0.0082. Dapat diartikan bahwa setiap peningkatan Kesesuaian Kompensasi sebesar 1 maka Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Y) meningkat sebesar 0.372375 dengan asumsi variabel lainnya konstan.

Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat nilai F (statistik) dengan tingkat signifikan (probabilitas) 0,00011 kecil dari 0,05, yang artinya secara simultan keefektifan pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, asimetri informasi, moralitas individu, dan kesesuaian akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Selanjutnya, koefisien determinan (R^2) atau *R-Square* digunakan untuk melihat kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. Dalam penelitian ini koefisien determinan digunakan untuk mengukur kemampuan variabel keefektifan pengendalian internal (X_1), ketaatan aturan akuntansi (X_2), asimetri

informasi (X_3), moralitas individu (X_4), dan kesesuaian kompensasi (X_5) dapat menjelaskan variabel kecenderungan kecurangan akuntansi (Y) pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Riau. Pada Tabel 4 menunjukkan Koefisien Determinasi (R^2) sebesar 0.233321, Hal ini berarti bahwa 23.33% kecenderungan kecurangan akuntansi dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen. Sedangkan sisanya 76.67% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam regresi ini.

Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil uji hipotesis pertama (H_1) bahwa keefektifan pengendalian internal berpengaruh secara negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H_1) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin efektif pengendalian internal, maka kecenderungan kecurangan akuntansi akan semakin terminimalisir.

Berdasarkan hasil uji hipotesis kedua (H_2) bahwa ketaatan aturan akuntansi berpengaruh secara negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H_2) diterima.

Berdasarkan hasil uji hipotesis ketiga (H_3) bahwa asimetri informasi berpengaruh secara positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, tetapi tingkat signifikansinya rendah

Berdasarkan hasil uji hipotesis keempat (H_4) bahwa moralitas individu berpengaruh secara negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, tetapi tingkat signifikansinya rendah. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat (H_4) ditolak.

Berdasarkan hasil uji hipotesis kelima (H_5) bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis kelima (H_5) diterima Hal ini menunjukkan bahwa pemberian kompensasi yang telah sesuai belum tentu dapat menekan kecurangan yang terjadi di instansi lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Riau

PENUTUP

Simpulan

Hasil penelitian membuktikan secara empiris bahwa keefektifan pengendalian internal dan ketaatan aturan akuntansi berpengaruh secara negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dan kesesuaian kompensasi berpengaruh secara positif. Sedangkan asimetri informasi dan moralitas individu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi

Keterbatasan dan Saran

Hasil analisis yang dikemukakan dalam penelitian ini mempunyai keterbatasan yang sebaiknya menjadi perhatian dan disarankan untuk penelitian selanjutnya. Penelitian ini hanya menggunakan 120 sampel dari keseluruhan pegawai yang ada di instansi Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Riau, sehingga untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah jumlah sampel agar hasil penelitiannya lebih akurat. Selanjutnya, dari hasil analisis koefisien determinasi menyatakan bahwa kelima variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini (keefektifan pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, asimetri informasi, moralitas individu,

dan kesesuaian kompensasi) memiliki pengaruh terhadap kecenderungan akuntansi sebesar 23,33%. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 76,67% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum dapat diketahui. Oleh karena itu untuk penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan atau menambah variabel-variabel lain yang berpotensi mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi.

Daftar Pustaka

- Bologna, Jack dan Robert (1993). Handbook of Corporate Fraud. Butterworth Heinemann. Boston.
- Jensen, M. and Meckling, W., 1976, iTheory of the Firm: Managerial Behavior Agency Cost, and Ownership Structure, Journal of Finance Economics 3, pp. 305-360
- Scott, R.W. 2000. Financial Accounting Theory 2nd Ed. Prentice Hall, New Jersey
- Tuanakotta, Theodorus M. 2012. Audit Berbasis ISA (International Standards on Auditing). Jakarta : Salemba Empat
- Wexley, K. N. & Yukl, G. A. 2003. Perilaku Organisasi dan Psikologi Personalia. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Wilopo, 2006. Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi: Studi Pada Perusahaan Publik dan Badan Usaha Milik Negara di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi 9, K-AKPM 19
- Wolk, H.I. and M.G. Tearney.1997. Accounting Theory: A conceptual and Institutional Approach. Edisi keempat. International Thomson Publishing
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
- www.antikorupsi.org
- http://e-keuangan.riau.go.id.